



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN LEWOLEMA
JIN. KABUPATEN TELP.
KAWALI WU

RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT LEWOLEMA
TAHUN 2017- 2022



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat serta bimbingan-Nya maka Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Lewolema dapat disusun dengan baik.

Rencana Strategis Kantor Camat ewolema merupakan Rencana penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan lima tahun ke depan, sebaga iimplementasi dari RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017- 2022, yang berisikan arah kebijakan strategis, Program dan kegiatan dalam rangka mencapai Visi Daerah " **FLORES TIMUR SEJAHATERA DALAM BINGKAI DESA MEMBANGUN, KOTA MENATA** ".

Kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Camat Lewolema ,atas kerja kerasnya dalam menyusun Renstra Kecamatan Lewolema.

Terimakasih juga disampaikan kepada Sekretaris Kecamatan, Para Kepala Seksi dan Staf pada Kantor Camat Lewolema, Kapospol Lewolema, Babinsa Lewolema, Para Kepala UPTD Se-Kecamatan Lewolema yang dengan caranya telah membantu menyelesaikan Renstra Kecamatan Lewolema ini.

Terimakasih.

Kawaliwu, 22 Januari 2018

Kamat Lewolema,

 Yohanes Ipi Hurint, S.Sos, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19670910 199703 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT LEWOLEMA	7
2.1 Tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Lewolema	7
2.2 Sumber daya Kecamatan Lewolema Tahun 2017	10
2.3 Kinerja pelayanan OPD Kecamatan Lewolema	13
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan OPD	17
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR CAMAT LEWOLEMA	19
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD	19
3.2 Telaahan Visi- Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur	24
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	25
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	29
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	32
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII. PENUTUP	39

BAB.I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Kantor Kecamatan Lewolema sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah (RPJM-OPD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kantor Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur, yang merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis OPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

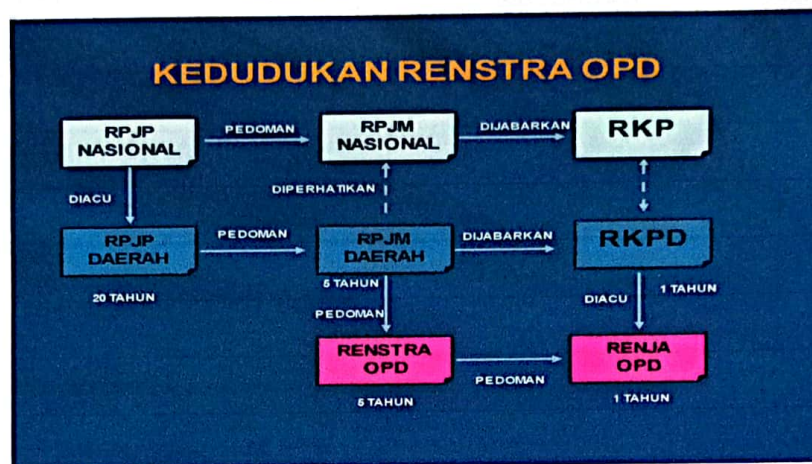
Di samping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Renstra-OPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Lewolema berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Lewolema. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Lewolema ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kantor Kecamatan Lewolema maupundengan mendorong peran serta aktif masyarakat dan penggalangan kemitraan untuk kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022.

Lebih lanjut ditegaskan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008, OPD juga menyusun Rencana Kerja (Renja-OPD) yang merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan ini meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Selanjutnya Rancangan Renja-OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Kedudukan renstra Kecamatan Lewolema seperti terlihat pada bagan dibawa ini

Bagan 1.1 Kedudukan Renstra OPD

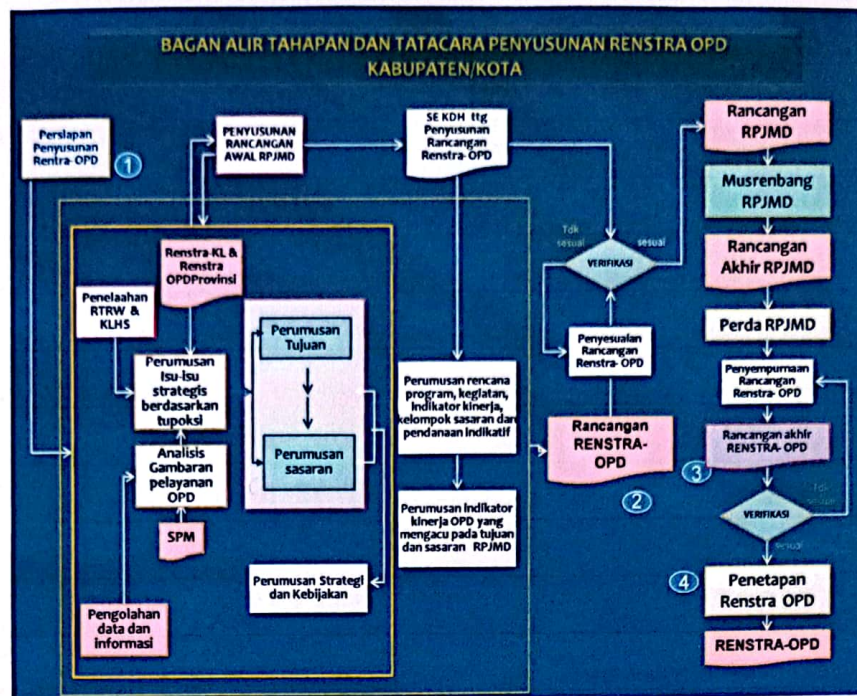


Renstra Kecamatan Lewolema adalah: Rencana strategis pembangunan disusun dalam rangkaperencanaan dan pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun kedepan harus berpatokan atau mengacu pada RPJMD kabupaten Flores Timur.

Hubungan RPJMD Kabupaten Flores Timur dengan renstra Kecamatan Lewolema:

1. Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman OPD dalam menyusun rancangan OPD.
2. Rancangan Renstra yang telah disusun selanjutnya disampaikan kepada Kepala BP4D untuk dilakukan verifikasi untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian Renstra RPJMD paling lama 14 hari kerja sejak surat edaran dari Kepala Daerah diterima.
3. BP4D melakukan verifikasi rancangan Renstra OPD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD.
4. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten menjadi pedoman penetapan Renstra OPD dan penyusunan RKPD serta diajukan sebagai instrument awal penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bagan 1.2. Alur tahapan dan tata cara penyusunan Renstra



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Lewolema adalah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2014
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Lewolema, Kec. Demon Pagong, Kec. Ile Bura, Kec. Adonara dan Kec. Adonara Tengah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas pembangunan Jangka panjang Kabupaten Flores Timur 2005-2025
22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 19 Tahun 2011 tentang struktur organisasi Kecamatan.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No tahun 2017 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPMJ) Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2021.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor :16 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor :.....)
25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Kecamatan Lewolema disusun dengan maksud untuk dijadikan Pedoman Bagi Aparatur Kecamatan dan stakeholder dalam pelaksanaan program kegiatan.

2. Tujuan

- Sebagai Dokumen perencanaan pembangunan untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah.
- Untuk menjadi Pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan (RENJA).
- Menjadi acuan/Grand Strategi bagi semua aparat dalam menentukan program dan kegiatan prioritas 5 Tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Lewolema 2018-2022, terdiri dari 8 bab yaitu :

Bab I Pendahuluan: memuat: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan

Serta sistematika penulisan

Bab II Gambaran pelayanan kantor Camat Lewolema

memuat: Tugas, Fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja pelayanan, Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kantor Camat Lewolema

Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Kantor Camat Lewolema

memuat : Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Kantor Camat Lewolema, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur terpilih, Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur, dan Penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

memuat: Tujuan dan sasaran, Indikator dan target kinerja tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 05 (lima) Tahun.

Bab V Strategi dan Arah kebijakan.

Memuat : Strategi dan Arah kebijakan Kantor Camat Lewolema untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam waktu 05 (lima) Tahun.

Bab VI Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan

Bab VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN LEWOLEMA

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Lewolema

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Lewolema adalah Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 2 thn 2006 tentang pembentukan Kecamatan

Lewolema, Kec. Lewolema, Kec. Ile Bura, Kec. Adonara dan Kec. Adonara Tengah. Dengan struktur organisasi sesuai peraturan Daerah No. 19 thn 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007.

Secara administrasi wilayah, Kecamatan Lewolema terdiri dari 7 Desa.

Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Lewolema

1. a. Kondisi Geografis.

Kecamatan Lewolema berbatasan dengan

Utara	: Teluk Hading
Timur	: Kecamatan Tanjung Bunga
Selatan	: Kecamatan Larantuka dan Ile Mandiri
Barat	: Kecamatan Lewolema

b. Luas wilayah Kecamatan Lewolema adalah: 108,61 km² dengan perincian:

1. Desa Lewobele	: 7,45 km ²
2. Desa Ile Padung	: 22,35 km ²
3. Desa Sinar Hading	: 19,22 km ²
4. Desa Riang Kotek	: 7,65 km ²
5. Desa Bantala	: 15,42 km ²
6. Desa Painapang	: 19,22 km ²
7. Desa Balukhering	: 17,30 km ²

c. Topografi

Kondisi Topografi Kecamatan Lewolema adalah : Gunung dan perbukitan dengan beberapa faktor yaitu:

- o Kemiringan lebih dari 40°
- o Ketinggian 10-150° meter dari permukaan laut
- o Struktur tanah yang bervariasi

d.Administrasi Pemerintahan.

Secara administrasi Kecamatan Lewolema terdiri dari 7 Desa dengan pusat pemerintahan/Ibu Kota Kecamatan di Kawaliwu(*Desa Sinar Hading*)

Tabel 2.1.Jumlah KK dan Penduduk (per-Sept. 2017)

No	Desa	Jumla KK	Jumlah Jiwa			Keterangan
			Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Lewobebe	94	185	187	372	
2	Ile Padung	261	563	639	1.202	
3	Sinar hading	271	576	650	1.226	
4	Riangkoteke	247	508	503	1.011	
5	Bantala	348	716	757	1.473	
6	Painapang	294	605	669	1.276	
7	Balukhering	402	791	858	1.649	
8	Jumlah	1.917	3.944	4.263	8.207	

Sumber data, Seksi Pemerintahan Kec. Lewolemma.

Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, OPD Kecamatan Lewolema didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 22 orang yang terdiri dari PNS = 16 orang ; Honor = 6 orang dan sebagai perangkat daerah memiliki Kedudukan, Tugas pokok dan fungsi serta Struktur Organisasi sebagai berikut :

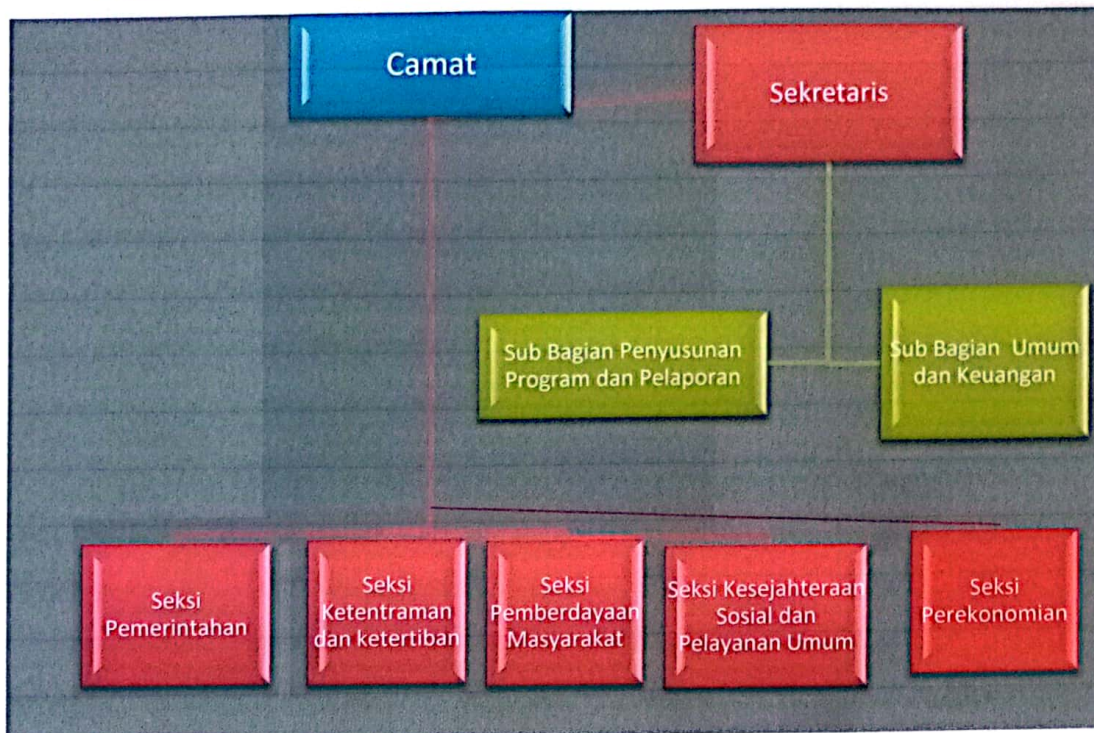
Kedudukan: Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai

Perangkat Daerah kabupaten yang di pimpin oleh seorang Seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan dengan struktur sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris, yang terdiri dari :
 - 2.1. Sub.Bagian Umum dan Keuangan
 - 2.2. Sub.Bagian Program dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan sosial dan Pelayanan Umum
7. Seksi Perekonomian

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Lewolema:



Tugas Pokok dan fungsi

a. CAMAT

1. Tugas: Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan.
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa atau Kelurahan

b. SEKRETARIS KECAMATAN

Tugas Pokok : Membantu camat dalam merencanakan, Mengarahkan, menyelenggarakan Kegiatan- kegiatan kesekretariatan yang Meliputi bidang umum dan keuangan, penyusunan program dan pelaporan serta pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

b.1. KasubBag. umum dan Keuangan.

Tugas Pokok: membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan sesuai ketentuan / pedoman dalam rangka tertib administrasi sesuai peraturan perundangan

b.2. Kasubag Program dan Pelaporan

Tugas Pokok : Membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan penyusunan program dan menyiapkan laporan tentang seluruh kegiatan perangkat pada kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

c. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Tugas pokok : Membantu camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.

d. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Tugas pokok : Membantu camat dalam menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban sesuai peraturan perundang-undangan.

e. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tugas pokok : Membantu camat dalam menyelenggarakan urusan pembangunan masyarakat desa / kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan.

f. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PELAYANAN UMUM

Tugas pokok : Membantu camat dalam menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial dan pelayanan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

g. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN

Tugas pokok : Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya OPD Kecamatan Lewolema Tahun 2017.**2.2.a Susunan aparatur/Kepegawaian**

Tabel 2.2 Jumlah PNS Kec.Lewolema berdasarkan Jabatan Awal Thn 2017

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH	Keterangan
1	Camat	III.a	1	
2	Sekretaris Camat	III.b	1	
3	Kepala Seksi	IV.a	5	
4	Kepala Subbagian	IV.b	-	2 = Lowong/ Belum terisi

Sumber: SubBagian Umum dan Keuangan Thn 2017

Tabel 2.3Jumlah PNS Kec.Lewolemaberdasarkan Pangkat Golongan / Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN / RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1	Pembina Tkt. I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tkt I	III/d	2
4	Penata	III/c	4
5	Penata Muda Tkt I	III/b	1
6	Penata Muda	-	-
7	Pengatur Tkt I	II/d	-
8	Pengatur	II/c	3
9	Pengatur Muda Tkt I	II/b	2
10	Pengatur Muda	II/a	-
11	Juru Tkt I	I/d	1
12	Juru	I/c	1
13	Juru Muda Tkt I	I/b	-
14	Juru Muda	I/a	-
JUMLAH			16 orang

Sumber:SubBagian Umum dan Keuangan Thn 2017

Tabel 2.4 Jumlah PNS Kec.Lewolemaberdasarkan Tingkat PendidikanAwal Thn 2017

NO	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah Pegawai
		PNS	Kontrak	
1	S-2	1	-	1
2	S-1	4	3	7
3	D III	2	-	2
4	D II	-	1	1
5	SLTA	7	2	9
6	SLTP	1	-	1
7	SD	1	-	1
JUMLAH		16	6	22

Sumber:SubBagian Umum dan Keuangan Awal Thn 2017

Tabel 2.5 Jumlah PNS Kec.Lewolema berdasarkan Diklat Penjenjangan Thn 2017

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JMLAH PEGAWAI
1	PIM II / SPAMEN	-
2	PIM III / SPAMA	1
3	PIM IV / ADUM / ADUMLA	3
JUMLAH		4

Sumber: SubBagian Umum dan Keuangan Awal Thn 2017

2.2.b Kondisi Aset Kantor Camat Lewolema awal Tahun 2017

Kecamatan Lewolema memiliki Inventaris/aset peralatan dan sarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, yang dapat dirincikan keadaannya pada tabel dibawah ini

Tabel 2.6 Kondisi aset Kantor Camat Lewolema Awal Thn 2017

NO	Jenis barang / inventaris	Jumlah	Keterangan
1	Gedung kantor	1 Buah	Baik
2	Rumah jabatan	1 Unit	Baik
3	Mess kecamatan	-	-
7	Aula rapat	-	-
8	Meja kerja	34 Buah	Baik
9	Lemari	6 Buah	Baik
10	Kursi kerja	20 Buah	Baik
11	Meja rapat	1 Buah	Baik
12	Sepeda motor	5 unit	Baik
13	Komputer/CPU	1 Unit	2 rusak
14	Laptop	8 unit	Baik
15	Peralatan sound system	1 Paket	Baik
16	Bangku Tunggu	2 Buah	Baik
17	Rak Kayu	6 Buah	Baik
18	Genset	1 buah	Baik
19	Jaringan Listrik (PLN)	Ada	
20	Jaringan Air	Ada	
21	Televisi	1 Set	Baik
22	Sofa	1 Buah	Baik

23	Kursi plastik	50 Buah	Baik
24	Parabola	1 Unit	Baik
25	Mic	1 unit	Baik
26	Stang Mic	2 buah	Baik
27	Proyektor & Attachment	1 Buah	Baik
28	Ac	1 unit	Baik
29	Buku Perpustakaan	1 paket	Baik
30	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2 Buah	Baik
31	Alat rumah Tangga lainnya	1 paket	Baik
32	Bangku tunggu plastik	6 buah	Baik
33	Jam Mekanis	2 buah	Baik
34	Gordyn	1 Buah	Baik, Berada di Rujab Camat
35	Springbad	1 buah	Baik, Berada di Rujab Camat
36	Kompor	2 buah	Baik, Berada di Rujab Camat
37	Rak piring Meja makan	1 buah	Baik, Berada di Rujab Camat
38	Kursi Kayu/ Rotan/ Bambu	7 buah	Baik, Berada di Rujab Camat
39	Meja Makan	1 buah	Baik, Berada di Rujab Camat
40	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	2 buah	Baik, Berada di rujab Camat

2.3 Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Lewolema

Untuk Kinerja Pelayanan OPD digunakan beberapa Indikator yaitu :

1. Prosentase tersedianya administrasi perkantoran.
2. Prosentase tersedianya sarana prasarana aparatur Kecamatan
3. Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran di Kecamatan dan laporan keuangan
4. Prosentase tersedianya sarana pendukung guna meningkatkan sumber daya aparatur dan hasil kegiatan.
5. Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat.
6. Prosentase peningkatan kualitas kinerja pemerintah Kecamatan.
7. Prosentase terpenuhinya kegiatan yang dilaksanakan dengan baik.

Dengan Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD maka dibandingkan dengan aturan yang ada maka betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD-OPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Namun demikian hal ini juga belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja seluruh elemen yang ada di OPD Kantor Kecamatan Lewolema selama ini belum bisa optimal.

Selanjutnya kinerja pelayanan pada kantor camat lewolema dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Lewolema

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
-1	-2	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Prosentase tersedianya administrasi per-kantoran	80%	80%	80%	80%	80 %	70%	70%	70%	75%	70 %	87,5%	87,5%	81,3%	81,3%	81,3 %
2	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	70%	70%	75%	75%	70 %	70%	70%	65%	65%	70 %	100%	100%	86,7%	86,7%	100 %
3	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	70%	75%	80%	85%	80 %	70%	70%	65%	65%	70 %	100%	93,3%	81,3%	76,5%	87,5 %
4	Prosentase tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan	60%	70%	80%	80%	80 %	60%	70%	80%	80%	70 %	100%	100%	100%	100%	87,5 %
5	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat	80%	80%	80%	80%	80 %	70%	70%	65%	65%	70 %	87,5%	87,5%	81,3%	81,3%	87,5 %
6	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	70%	70%	70%	70%	80 %	70%	70%	70%	70%	70 %	100%	100%	100%	100%	87,5 %
7	Prosentase terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik	60%	60%	60%	60%	80 %	60%	60%	60%	60%	70 %	100%	100%	100%	100%	87,5 %

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Lewolema (2013-2017)

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013 (RB)	2014 (RB)	2015 (RB)	2016 (RB)	2017 (RB)	2013 (RB)	2014 (RB)	2015 (RB)	2016 (RB)	2017 (RB)	2013	2014	2015	2016	2017	Anggar an	Realisa si
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Belanja Langsung																	
Prog.pelayanan adm.perkantoran	253.740,5	239.369	249.778	395.168	391.600	224.312	211.884	212.627	380.405	408.227	88 %	89 %	85 %	96 %	104 %		
Program peningkatan sarana prasarana aparatur	25.552	53.775	110.480	65.494	165.685	17.112	49.426	105.066	62.386	146.115	67 %	92 %	95 %	95 %	88 %		
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	34.381	37.100	0	0	0	34.377	37.100	0	0	0	100 %	100 %	0	0	0		
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.955	11.650	0	0	0	6.955	9.150	0	0	0	100 %	79 %	0	0	0		
Program perencanaan pembangunan daerah	7.160	9.700	0	0	0	7.160	9.700	0	0	0	100 %	100 %	0	0	0		
Program peningkatan pelayanan social kemasyarakatan	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	100 %	100 %	0	0	0		

Renstra Kec.Lewolema

Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	31.780	47.000	38.500	36.600	0	28.760	47.000	16.755	19.900	0	90 %	100 %	44 %	54 %		
Program koordinasi, pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan	0	0	116.196	87.395	52.295	0	0	112.507	77.665	59.295	0	0	97 %	89 %	113 %		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD

Peningkatan Kualitas Pelayanan public melalui Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam mewujudkan Good Governance and clean government menemui beberapa **tantangan dan permasalahan** yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggara tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

- o Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan.
- o Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain Perencana, Pengelola anggaran/pembukuan, teknik bangunan dan lain lain sumber daya yang professional.
- o Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.
- o Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.
- o Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi.
- o Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu Kecamatan yang kurang memadai.
- o Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Sedangkan **peluang** yang secara logis dapat dimanfaatkan meliputi :

- o Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- o Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

- o Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
- o Posisi wilayah yang strategis yakni dekat dengan pusat Kota.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR CAMAT LEWOLEMA

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai Kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan kecamatan dari struktur pemerintahan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan (Camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Lewolema, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Lewolema

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Skpd)	Eksternal(Diluar Kewenangan Skpd)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik	Belum optimal	Optimal dan tepat	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat	Ketersediaan dana dan sarana prasarana	Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik yang belum optimal
Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan	Belum optimal	Optimal dan tata kelola pemerintahan di desa yang baik	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat serta konsistensi pendampingan	Ketaatan dan konsistensi serta sinergitas program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan yang belum optimal
Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan	Belum optimal dan sinergis	Optimal dan sinergis	Profesionalitas aparatur dan jalinan kerjasama yang dibangun	dukungan dan sinergitas pelaksanaan program	Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang belum optimal dan sinergis.
Tingkat Partisipasi	Rendah	tinggi	Kehandalan aparatur kecamatan dalam meningkatkan partisipasi	Globalisasi dan teknologi	Tingkat Partisipasi masyarakat yang masih rendah
Kohesi sosial masyarakat	Berkurang	tinggi	Pendekatan yang humanis dan profesionalitas aparatur	Solidaritas dan semangat gotongryong	menurunnya tingkat kohesi sosial masyarakat
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Berkurang	tinggi	semangat anti KKN yang dimiliki aparatur	Tindakan penegakkan hukum terhadap pelaku KKN yang memberi efek jera bagi para pelakunya	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran	Belum optimal	Optimal, cepat dan tepat sasaran	Ketersediaan aparatur dan sarana prasarana pendukung ,SOP dan tanpa KKN	Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan	Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran yang belum optimal
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Belum optimal	Optimal dan kesejahteraan meningkat	Kewenangan Kecamatan dan merencanakan dan mengelola program pemberdayaan ekonomi serta	program pemberdayaan yang yang menyentuh masalah dan kebutuhan masyarakat serta pendanaan dan pendampingan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan tidak disertai dengan pendanaan yang minim
Pelanggaran hukum;	tinggi	Rendah	Penegakkan hukum tanpa diskriminasi	Penegakkan hukum tanpa diskriminasi oleh aparatur penegak huku tingkat atas	Tingginya angkapelanggaran hukum dan penegakkan hukum masih diskriminatif;

Income perkapita masyarakat	Rendah	Tinggi	Pendampingan dan kemampuan mengelola potensi yang dimiliki	Pemanfaatan potensi dan pengolahan serta pemasaran produksi	Income perkapita masyarakat yang masih rendah
Demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;	Belum optimal	Demokratis dan etis	Ketaatan terhadap regulasi dan keterbukaan komunikasi baik formal maupun informal	etika demokrasi dan pemahaman terhadap demokrasi	Pengabaian etika demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat	Rendah	tinggi	Ketersediaan dan kapasitas aparatur yang cukup memadai	Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya perekrutan tenaga kontrak	Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat yang masih rendah
Derajat Kesehatan masyarakat	Rendah	tinggi	Perhatian dan minat aparatur yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat	kketersediaan dan perhatian para aparatur medis dan paramedis serta ketersediaan sarana prasarana	Derajat Kesehatan masyarakat yang masih rendah
Kemiskinan dan pengangguran	tinggi	Rendah	Adanya perhatian yang serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran	Angka ketergatalan, program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta terbatasnya pendanaan program penanggulangannya

Tabel 3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/ Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalinnnya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan beberapa lembaga Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MOGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good governance dan clean goverment menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan serta pemberlakuan e-KTP	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	
4	Meningkatnya kerjasama antara negara	Partisipasi masyarakat menjadi isu yang sangat kuat dalam berbagai regulasi perencanaan di tingkat pusat	(4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	

3.2. Telaahan Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017- 2022 adalah :

Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun, Kota Menata.

Makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Flores Timur sejahtera adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat flores timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
2. Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/Kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur Sejahtera.

Misi Pembangunan Kabupaten Flores timur merupakan rumusan upaya- upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017- 2022 sebagai berikut :

- 1. Selamatkan orang muda Flores Timur.**
- 2. Selamatkan infrastruktur Flores Timur.**
- 3. Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur.**
- 4. Selamatkan Laut Flores Timur**
- 5. Reformasi Birokrasi.**

Misi Kesatu Selamatkan orang muda Flores timur dimaksudkan agar pembangunan Flores timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda flores timur dapat mengaktualisasikan diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

Misi Kedua Selamatkan infrastruktur Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

Misi Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktifitas dan nilai ekonominya.

Misi Keempat Selamatkan Laut Flores Timurr dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

Misi Kelima Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Gavernance dan Clean Government.

Sebagai salah satu OPD, maka Kantor Kecamatan Lewolema berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Namun demikian dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan,minimnya anggaran dan sarana prasarana pendukung, implementasi fungsi koordinasi dengan OPD yang belum optimal, sehingga hal ini berpengaruh kepada terwujudnya visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores timur.

3.3. Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah kabupaten Flores Timur

Kecamatan Lewolema dalam struktur ruang berada pada Hirarki Vyang berfungsi sebagai hinterland. Sedangkan dilihat dari perwilayahan pembangunan di Kabupaten Flores Timur, kecamatan lewolema termasuk dalam SSWP I, dengan fungsi, peran dan arahan kegiatannya, sebagai berikut :

1. Memiliki pusat pelayanan sendiri tapi masih terpengaruh kuat oleh Kota Larantuka sehingga cenderung berorientasi ke Kota Larantuka sebagai pusat SSWP I.
2. Kegiatan utama pada SSWP I diarahkan pada :
 - Pusat pemerintahan skala kabupaten.
 - Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa
 - Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)
 - Pengembangan kawasan peternakan
 - Pengembangan perikanan dan kelautan
 - Pengembangan kegiatan industri yang berorientasi pasar baik itu industri kecil, industri sedang, atau industri besar (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, industri pengelolaan ikan)
 - Pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya (seperti hotel, penginapan dan restoran)
 - Pengembangan Pertambangan

Dengan demikian, ketaatan terhadap tata ruang di kecamatan Lewolema menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi yang diharapkan demikian hingga saat ini masih menjadi persoalan dalam pelayanan di tingkat kecamatan. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
1	Koordinasi dan pengendalian pemanfaatan Tata Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal	Belum ada Dokumen RDTRK Kecamatan Lewolema	Ada Perda RTRW
2.		Pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan Lewolema belum memperhatikan/mengabaikan aspek penataan ruang	- Kurangnya dukungan masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang - Kurangnya informasi dan dokumen tata ruang bagi masyarakat di wilayah kecamatan lewolema	Sebagian aparatur kecamatan dan regulasi yang mengatur terkait dengan pengelolaan tata ruang

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Lewolema. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini maka harus dilakukan Refleksi terhadap segala sesuatu yang berada di dalam maupun di luar organisasi tersebut. Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE).

Untuk itu Kantor Kecamatan Lewolema perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable (dapat dikuasai)* yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya *uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai)* yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan) Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman) (SWOT).

Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada OPDKantor Kecamatan Lewolema sebagai berikut

A. Kekuatan

1. Jumlah Pegawai yang memadai.
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif.
3. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sehingga sebagai OPD tersendiri maka memiliki sebagian Kewenangan Bupati.
4. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi
5. Pola kerja di Kecamatan Lewolema yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif
6. Dari sisi Dokumen Perencanaan, semua Desa (7 Desa) yang sudah memiliki Dokumen RPJMDes
7. Suasana kerja di Kecamatan Lewolema yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*)
8. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Lewolema sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari,

meliputi, gedung, ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran

9. Sarana dan Prasarana transportasi dan komunikasi yang sudah cukup memadai

B. Kelemahan

1. Kualitas SDM Aparat yang masih kurang
2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan
3. Sarana prasarana kantor kurang memadai.
4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik-turun)
5. Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
6. Kurangnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran
7. Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan
8. Masih Lowongnya beberapa jabatan struktural
9. Kurangnya Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

C. Peluang

1. UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya (PP 19)
2. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan
3. Adanya Bimtek/Diklat dan Sosialisasi tentang Peraturan-Peraturan yang diadakan di Kabupaten
4. Pesatnya Kemajuan teknologi dan Globalisasi
5. Adanya Program-Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat.

D. Ancaman/Tantangan

1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar
2. Perilaku masyarakat belum mendukung program – program pembangunan (orientasi Proyek)

3. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
4. Masih tingginya keluarga miskin berbatasan dengan kabupaten lain sehingga rawan kamtibmas
5. Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat pemerintah desa.

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi organisasi, strategi yang sesuai adalah strategi *agressive* artinya organisasi harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya digali dan dikelola.

Berdasarkan analisis SWOT, maka ditemukan beberapa isu strategi :

1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur baik di kantor Kecamatan maupun aparatur Desa
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan.
4. Pemanfaatan data, informasi dan teknologi dalam menghadapi dan mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan.

BAB.IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah:

Tujuan dan sasaran jangka menengah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Lewolema mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - Misi (5) “ Reformasi Birokrasi “ dan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan	Sasaran	Ind.Sasrn	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke...				
			2018	2019	2020	2021	2022
Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.	- Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur. - Meningkatnya sarana prasarana pelayanan kemasyarakatan	Terpenuhinya/terisinya jabatan struktural.	75 %	100%	100%	100%	100 %
		Disiplin.	70%	75%	80%	90%	90%
		Jumlah aparatur yang ikut diklat/Bimtek.	50 %	75 %	80 %	85%	90 %
		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	75%	80%	85%	85 %	90%
	Meningkatnya kualitas pelayanan public.	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum dan pemerintahan kepada masyarakat.	75 %	80 %	85 %	85 %	90%
	Terwujudnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan	Tersedianya Dokumen rencana pembangunan (RP,JMDes,RKPDDes).	14 Dok.	7 Dok.	7 Dok.	7 Dok.	7 Dok.
		Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan.	70%	75 %	80%	85%	90%
		Tersedianya data/profil desa/kecamatan	70%	75 %	80%	85%	90%
		Adanya fasilitasi penyelesaian masalah social kemasyarakatan.	70%	75%	80%	85%	90%
		Tersedianya pelayanan administrasi dan perijinan kepada masyarakat.	70 %	75%	80%	85%	90%
		Menurunnya angka kriminal dan gangguan kamtibmas.	70 %	75%	80%	85%	90%

		Koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah kecamatan dan Desa serta antar Desa dan desa	60%	70%	75%	80%	85%
	Meningkatnya system evaluasi, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Dokumen Evaluasi, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Lewolema untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai implementasi dari RPJMD Tahun 2017- 2022 dapat dilihat dalam Tabel 5.1 dibawah ini :

Visi	Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota menata		
Misi	Reformasi Birokrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.	- Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur. - Meningkatnya kualitas sarana prasarana.	- Mengikuti Diklat dan Bimtek.sosialisasi. - Mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi - Memelihara dan mempergunakan sarana/paserana dengan baik. - Pengadaan sarana /prasarana sesuai mutu dan kebutuhan.	- Diklat dan Bimtek - Kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan. - Pemeliharaan / perawatan berkala sarana prasarana. - Pengadaan sarana/prasarana kantor
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Peningkatan kualitas pelayanan public.	- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan public. - Peningkatan TUPOKSI sesuai dengan uraian tugas dalam jabatan.
	Terwujudnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan	- Melaksanakan pendampingan penyusunan RPJMDes. - Kerja Bakti gotong royong.	- Bimtek dan pendampingan. - Bulan bakti gotong royong.
		- Penyelesaian masalah dengan pendekatan adat budaya. - Penertiban Administrasi & pemberian ijin/rekomendasi	- Fasilitasi dan koordinasi. - Pemberian ijin/rekomendasi.
		- Melaksanakan pembinaan Kamtibmas. - Penerapan PerDa dan peraturan perundang-undangan.	- Fasilitasi & koordinasi - Sosialisasi - Pemberian ijin / rekomendasi
		Melaksanakan koordinasi dengan semua instansi terkait ditingkat Kecamatan dan desa.	Konsultasi dan koordinasi
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	Peningkatan pengembangan system evaluasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Peningkatan Disiplin Aparatur - Penyusunan Dok. Penrencanaan yang berkualitas (target dan sasaran terukur, partisipatif dan tepat waktu) - Penyusunan Dok. LAKIP dan Keuangan serta Aset.

BAB.VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Lewolema adalah dokumen yang memuat rencana rencana program dan kegiatannya, kelompok sasaran dan indikator kinerja serta pendanaan indikatif 5 Tahun kedepan (2018-2022) di kecamatan Lewolema .Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut di bawah ini.

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran program (outcome, kegiatan (output)	Data Capaian pada awal perencaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit kerja penang- gung jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Akhir			
						Target	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mengembang kan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Program pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksanan ya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	237,775	100%	261,552	100%	287,707	100%	316,478	100%	348,126	100%	1,451, 638		Kantor Camat

Penyediaan jasa surat menyurat		135 lbr	135	810	140 lbr	840	145	870	150 lbr	900	155 lbr		725 lbr	4,350	Sekret
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik		bln	12 bln	10,000	12 bln	11,000	12 bln	12,100	12 bln	13,310	12 bln	14,641	60 bln	61,051	Sekret
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		5 unit	5 unit	1,200	7 unit	2,800	7 unit	2,800	7 unit	2,800	7 unit	2,800	7 unit	12,400	Sekret
Penyediaan jasa administrasi keuangan		7 orang	7 orgg	34,700	7 org	34,700	7 org	34,700	7 org	34,700	7 orang	34,700	7 orang	34,700	Sekret
Penyediaan jasa kebersihan kantor		15 jenis brg	15 jenis brg	2,000		2,200		2,420		2,662		2,928		12,210	Sekret
Penyediaan alat tulis kantor		100%	100%	10,050	100%	11,100	100%	12,210	100%	13,431	100%	14,774	100%	61,565	Semua Seksi
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		35.000 lbr	35	10,000		11,000		12,100		13,310		14,641		61,051	Sekret
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100%	100%	3,500	100%	3,850	100%	4,235	100%	4,658	100%	5,123	100%	21,366	Sekret
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		24 exem.	24	1,500	24	1650	24	1,815	24	1,996	24	2,195	120 exem	9,156	Sekret

		Penyediaan makanan dan minuman		100%	100%	10,000	100%	11,000	100%	12,100	100%	13,310	100%	14,641	100%	61,051	Sekret	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		100%	100%	57,225	100%	61,947	100%	68,141	100%	74,955	100%	82,450		344,718	Semua seksi	
		Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran		72 OB	72 OB	83,000	72 OB	83,000	72 OB	83,000	72 OB	83,000	72 OB	83,000	360 OB	415,000	Sekret	
	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kemasyarakatan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pelayanan kepada masyarakat	70%	75%	20,125	80%	22,138	85%	24,351	90%	26,786	95%	29,465		122,865		Kantor Camat
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	5 unit				2 unit		0		0		0	2 unit		Sekret	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang diadakan.	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekret	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan.	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekret	
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Tingkat prosentasi pemeliharaan rumah jabatan yang	70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekret	

			dicapai.														
		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tingkat prosentase pemeliharaan gedung kantor yang dicapai.	70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekret
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional	5 unit	5 unit		7 unit		7 unit		unit		7 unit		7 unit		Sekret
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Prosentase pemeliharaan yang dicapai.	70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekret
	Meningkatnya kapasitas Sumber daya aparatur	Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumber daya aparatur	70%	70%	36,600	75%	40,260	80%	44,286	85%	48,715	90%	53,586	95%	223,447	Semua seksi Kantor Camat
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya	36600		36,600		40,260		44,286		48,715		53,586		223,447	Semua seksi
	Terwujudnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan	Program koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	Terlaksananya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan	70%	70%	104,700	75%	115,170	80%	126,687	85%	138,240	90%	152,024	95%	636,824	Semua seksi Kantor Camat

		Penyelenggaraan Musrenbang	Jlh peserta yang mengikuti Musrenbang			19,200		21,120		23,232		25,555		28,110		117,217	Seksi PMD
		Fasilitasi dan koordinasi pelayanan kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi	75%	100%	43,550	100%	47,905	100%	52,695	100%	57,964	100%	63,760	100%	265,874	Semua seksi
		Pendampingan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah pendampingan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	75%	100%	42,000	100%	46,200	100%	50,820	100%	55,902	100%	61,492	100%	256,414	Seksi PMD
		Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan disiplinnya														Semua seksi
		Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan yang dihasilkan	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Semua seksi
		Penyusunan Renstra Kecamatan	Jumlah Dok. Renstra	1 Dok	1 Dok.		0		0		0		0		1 Dok.		Semua Seksi
		Penyusunan Renja Kecamatan	Jumlah Dok. RKA	1 Dok.	1 Dok.		1 Dok.		1 Dok.		1 Dok.		1 Dok.		5 Dok.		Semua Seksi
		Penyusunan Laporan Keuangan dan aset	Jumlah Dok. Laporan Keuangan dan Aset	2 Dok.	2 Dok.		2 Dok.		2 Dok.		2 Dok.		2 Dok.		10 Dok.		Sekret
		Penyusunan LAKIP	Jumlah Dok. LAKIP	1 Dok.	1 Dok.		1 Dok.		1 Dok.		1 Dok.		1 Dok.		5 Dok.		Semua Seksi

Renstra Kec.Lewolema (2017-2022)

BAB.VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan program kerja di Kecamatan Lewolema diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu aparatur di tingkat Kecamatan senantiasa melaksanakan kewajibanya dan selalu berupaya meningkatkan kinerja pelayanan sesuai Tupoksinya. Untuk mencapai hal tersebut, tabel dibawah ini menggambarkan target pencapaian kinerja pelayanannya selama 5 tahun (2018-2022) berdasarkan indikator penilaian.

No	Indikator	Kondisi kinerja Pd awal periode RPJMD (thn 0)	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir tahun Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Prosentase tersedianya administrasi per- kantor	65%	69%	70%	71%	72%	73%	73%
2	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparat	65%	70%	71%	73%	74%	75%	75%
3	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	65%	70%	72%	83%	84%	85%	85%
4	Prosentase tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan	80%	81%	82%	83%	84%	85%	85%
5	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat	65%	66%	69%	70%	71%	72%	72%
6	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	70%	72%	73%	74%	75%	76%	76%
7	Prosentase terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik	60%	63%	65%	66%	67%	68%	68%

8	Prosentase fasilitasi penyelesaian kasus/konflik	50%	54%	55%	60%	62%	65%	65%
9	Prosentase partisipasi masya dalam perencanaan pembangunan	60%	62%	63%	64%	65%	66%	66%
10	Prosentase pengelola keuangan dan pelaporan tepat waktu dan sasaran	65%	66%	67%	68%	69%	70%	70%
11	Prosentase tersediaya data penduduk	60%	63%	65%	66%	67%	68%	68%
12	Prosentase disiplin dalam melaksanakan tugas	60%	62%	64%	66%	68%	70%	70%
13	Prosentase pelayanan dokumen kependudukan dan pertanahan	65%	66%	67%	68%	69%	70%	70%
14	Presentasi proses perijinan	65%	66%	67%	68%	9%	70%	70%
15	Prosentase pendampingan penyusunan PerDes & laporan pemerintahan Desa	65%	66%	67%	68%	9%	70%	70%
16	Prosentase jumlah aparat yang memperoleh kesempatan mengikuti diklat dan pendidikan lanjutan	70%	71%	72%	73%	74%	75%	75%
17	Terbentuknya BUMDes masing masing Desa	67%	68%	69%	70%	71%	72%	72%
18	Menurunkan angka kriminal dan pelanggaran peraturan UU	70%	71%	72%	73%	74%	75%	75%

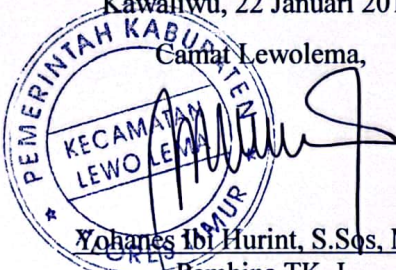
BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Lewolema Tahun 2017- 2022 merupakan Dokumen perencanaan kegiatan pelayanan pemerintah Kecamatan Lewolema, sebagai implementasi dari arah kebijakan RPJMD periode 2017- 2022, yang selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Aparatur Pemerintah Kecamatan Lewolema dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan public, percepatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Lewolema.

Renstra Kecamatan Lewolema Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, namun masih ada kekurangan sehingga sangat diharapkan partisipasi dari semua aparatur di Kecamatan, Instansi lintas sektor terkait maupun semua pemangku kepentingan di Kecamatan Lewolema dalam memberikan usul, saran yang konstruktif demi terlaksananya perencanaan sebagaimana termuat dalam Dokumen Renstra Kecamatan Lewolema Tahun 2017-2022 ini.

Terima kasih.

Kawaliwu, 22 Januari 2018
Camat Lewolema,

Johanes Ibi Hurint, S.Sos, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19670910 199703 1 006